

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI *ONLINE*

Taufiq Akbar Rifaldy , Salamiah , Sri Herlina

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810688

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1128037202

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1131089102

Email : taufiqakbarrifaldy@gmail.com

ABSTRAK

**Taufiq Akbar Rifaldy NPM. 19810688 .2023.PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TRASAKSI *ONLINE*. Skripsi.**
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Yang
dibimbing oleh Ibu Salamiah, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing I dan Ibu Sri Herlina,
S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan Transaksi
Online

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

pertanggungjawaban hukum pidana terhadap penipuan transaksi *online* dan penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahan yang ada.

Perjanjian jual beli di penipuan online adalah sah dan mengikat bagi penjual dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan *online* ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.

ABSTRACT

Taufiq Akbar Rifaldy. NPM. 19810688. 2023. LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OUT OF MARRIAGE ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Supervised by Mrs. As Salamiah, S.H.,M.H. Advisor I and Mrs.Sri Herlina, S.H.,M.H as Advisor II.

Keywords: Criminal Law Responsibility, Criminal Acts of Online Transaction Fraud

Advances in information and communication technology make it easier for people to receive and provide information to the wider community. People can easily communicate without any limits of distance, space and time. Along with the development of communication technology, society is encouraged to be able to follow every development that is happening. The current development of communication technology is not just for the sake of communicating and socializing, but has opened the world's eyes to a new world, new interactions, new market places, and a world business network that has no boundaries.

criminal law responsibility for online transaction fraud and resolution of criminal acts of online business fraud

.The legal research method used is normative, namely by examining existing library materials which are compiled and presented prescriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating existing problems. The sale and purchase agreement in online fraud is valid and binding for the seller based on the principle of freedom of contract.

The verbal agreement at this online social gathering still has legal force by attaching valid evidence in accordance with the ITE Law. Legal remedies taken if one of the parties defaults is by providing compensation, canceling the agreement and other legal remedies that have been agreed upon at the beginning of the agreement.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, (2013), Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014,
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014,
- Fahmi M Ahmadi, dan Jaenal Aripin, 2010,*Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat Lembaga Penelitian UIN Jakarta,
- Ira Alia Maerani, 2018. Hukum Pidana dan Pidana Mati, Penerbit Unisula press Dikutip dari Anin Hamzah, 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,.
- M. Yahya Harahap, (2017), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Moeljatno,2008, Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi,(Jakarta;Rineka Cipta),
- Niniek Suparni,2009,*Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta, YPKIK,
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*,2004 Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, ,
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I),.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*
- Zainuddin Ali,2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu
- Zulkifli damanik, Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online (Ecommerce)*, 2012skripsi pada universitas simalungan, pemantangsiantar,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Erin Oktaviana Winarta Putri dan Deny Suwondo, 2022, Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan transaksi *online*. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2., No.4

Website/Internet

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5773/2/B011171056_skripsi%201-2.pdf

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6532562/pengertian-konsiliasi-beserta-manfaat-dan-contohnya/amp>

(<http://mahendraputra.net/wpcontent/uploads/2008/12/bahan-kuliah- alternatif- penyelesaian-sengketa-dagang-5.pdf>)

<https://developers.bri.co.id/id/news/7-keuntungan-transaksi-online-untuk-pemilik-bisnis>